



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA BATAM  
**UNIT KERJA** : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AZRIL APRIANSYAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHHK : 420996

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 830.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
2. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HADIAH Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 223 m2 di KAB / KOTA KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 130.000.000

1. MOBIL, SUZUKI AV1414FTYPE2SDXAT/ MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 45P(BYSON)/ SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 65.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 80.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. 56.000.000

**Sub Total** Rp. 1.161.000.000

**III. HUTANG** Rp. 333.349.699**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 827.650.301

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.